

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis, mengenai *Good Tourism Governance* Pada Kebun Raya Mangrove Surabaya Sebagai Upaya Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan sepuluh prinsip yang termuat dalam teori *good tourism governance* menurut Sunaryo (2013), sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat Terkait telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Pengelolaan ekowisata di Kebun Raya Mangrove Surabaya belum melibatkan peran strategis masyarakat secara optimal, sehingga pola pengelolaannya masih tersentralisasi pada pemerintah. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap pelaksanaan program sehingga masyarakat belum dilibatkan dalam tahapan strategis seperti perencanaan, mengidentifikasi sumber daya, dan pengawasan kawasan. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakberlanjutan partisipasi pokdarwis. Sehingga diperlukan penguatan prinsip partisipasi masyarakat terkait dalam setiap proses pengembangan Kebun Raya Mangrove Surabaya.
2. Prinsip Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Pengelolaan ekowisata di Kebun Raya Mangrove Surabaya telah melibatkan pemerintah melalui berbagai OPD, sektor swasta melalui program CSR, serta akademisi melalui kegiatan riset dan pengembangan. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat parsial dan

belum didukung oleh kerangka kerja kolaborasi yang terintegrasi. Keterlibatan sektor swasta dan akademisi juga masih bersifat insidental dan belum menjadi kemitraan jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, mekanisme koordinasi formal dan integrasi program lintas sektor perlu ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan ekowisata yang efektif.

3. Prinsip Kemitraan Kepemilikan Lokal telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Keberadaan ekowisata di Kebun Raya Mangrove Surabaya telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Namun, implementasinya belum optimal karena manfaat kemitraan masih belum merata, program penguatan usaha masih terbatas pada kelompok tertentu, serta pendapatan masyarakat masih rentan akibat kebijakan tarif masuk yang fluktuatif. Sehingga diperlukan pelibatan suara masyarakat sekitar bahan evaluasi kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Selain itu, diperlukan penyusunan program peningkatan kapasitas usaha secara merata serta penguatan kerja sama dengan agen *tour & travel*.
4. Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Pada aspek sumber daya alam, pengelolaan sudah berjalan baik melalui pemanfaatan mangrove yang tetap menjaga fungsi ekologis, mendukung konservasi, menerapkan konsep minim limbah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bahkan, pengelolaannya telah mengacu pada standar nasional dan internasional. Namun, pada aspek sumber daya buatan masih ditemukan kelemahan dalam manajemen

pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala utama dalam menjaga keberlanjutan fasilitas wisata. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini masih membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, diperlukan penyusunan SOP perawatan berkala dan sistem pencatatan aset yang terintegrasi untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan fungsi fasilitas dalam jangka panjang.

5. Prinsip Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Pengelola telah menyediakan berbagai saluran komunikasi. Namun, optimalisasi prinsip ini terhambat karena saluran tersebut hanya berfungsi untuk menampung keluhan operasional, belum meratanya akses komunikasi antar kelompok masyarakat, serta terbatasnya kewenangan pengelola dalam mengakomodasi aspirasi. Sehingga diperlukan pembentukan forum aspirasi masyarakat ataupun FGD yang tidak sekedar didengar, melainkan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
6. Prinsip Daya Dukung Lingkungan telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Pengelola belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan antar aspek. Meskipun daya dukung biotik telah terjaga dengan baik, kelemahan pada ketegasan penegakan aturan pengunjung, minimnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap permasalahan sampah, serta belum terstrukturnya atraksi budaya lokal turut menghambat penerapan prinsip ini. Sehingga diperlukan penegakan aturan bagi pengunjung, penguatan edukasi

dan kolaborasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah, serta pengembangan program wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

7. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Program telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Meskipun pengawasan ekologis dan kontrol administratif telah tertata dengan baik, namun evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi dan sinergi antar kelembagaan masih berjalan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola dan pihak yang terlibat belum memiliki instrumen dan kesadaran yang terintegrasi dalam melakukan monitor dan evaluasi terhadap dampak ekowisata secara holistik. Sehingga diperlukan penyusunan SOP evaluasi yang komprehensif, peningkatan ketegasan aturan demi melindungi daya dukung ekonomi UMKM, optimalisasi promosi digital, serta pembentukan forum evaluasi bersama yang secara rutin mengintegrasikan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat luas.
8. Prinsip Akuntabilitas Lingkungan telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Pengelola belum memiliki sistem pelaporan pertanggungjawaban lingkungan yang mengkaji dampak ekowisata secara keseluruhan dan berkelanjutan. Akuntabilitas lingkungan yang ada cenderung bergantung pada pihak eksternal. Sedangkan, pihak pengelola secara internal masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun alokasi finansial. Sehingga kapasitas kelembagaan dalam penyusunan sistem pelaporan lingkungan secara mandiri yang dapat diakses publik perlu ditingkatkan untuk mewujudkan akuntabilitas yang efektif.

9. Prinsip Pelatihan pada Masyarakat Terkait telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan masyarakat masih bergantung pada pihak eksternal sehingga masih belum terintegrasi dalam program kerja pengelola. Sehingga pelatihan yang terselenggara masih bersifat insidental, tidak berkelanjutan, dan materi yang diberikan belum mencakup aspek pariwisata berkelanjutan secara komprehensif. Selain itu, sasaran program pelatihan masih terbatas pada pelaku UMKM sehingga belum menjangkau kelompok nelayan dan tani. Kemudian juga diperburuk oleh belum adanya sistem pencatatan program pelatihan yang telah diselenggarakan. Sehingga penyelenggaraan program pelatihan yang inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan perlu ditingkatkan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kebun Raya Mangrove Surabaya.
10. Prinsip Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Sebagian upaya advokasi budaya telah dilakukan oleh pengelola melalui internalisasi nilai-nilai lokal kepada pengunjung secara edukatif, meskipun implementasinya masih terbatas. Sedangkan, strategi promosi digital masih belum menjangkau publik secara masif yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat luas terhadap destinasi wisata tersebut. Dengan demikian, strategi promosi digital yang komprehensif dan pengemasan nilai budaya lokal menjadi produk wisata yang terstruktur perlu ditingkatkan dalam proses pengembangan Kebun Raya Mangrove Surabaya.

Secara keseluruhan, penerapan *good tourism governance* pada Kebun Raya Mangrove Surabaya sebagai upaya pengembangan ekowisata berkelanjutan dinilai telah terlaksana, namun belum berjalan secara optimal. Pengembangan Kebun Raya Mangrove Surabaya telah mengacu pada lima unsur ekowisata berkelanjutan namun pelaksanaan sepuluh prinsip tersebut belum berjalan optimal sehingga masih memerlukan perbaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan, lemahnya koordinasi formal antar pemangku kepentingan, pendekatan pengelolaan yang cenderung bersifat *top-down*, ruang aspirasi masyarakat yang terbatas, sistem monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas yang belum terintegrasi dan terstruktur secara menyeluruh. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan masyarakat serta pengembangan atraksi budaya lokal juga belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam rencana kerja pengelola, diperkuat dengan belum optimalnya transparansi akses informasi terkait program kerja dan dokumen perencanaan kawasan kepada publik.

Jika dikaitkan dengan pencapaian SDGs, pengelolaan Kebun Raya Mangrove Surabaya telah berkontribusi terhadap SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan), SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDGs 14 (Ekosistem Laut), SDGs 15 (Ekosistem Daratan), dan SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Namun, kontribusi tersebut masih bersifat parsial dan belum didukung oleh integrasi kebijakan, indikator pengukuran yang terstandar, serta sistem pelaporan yang komprehensif, sehingga pencapaiannya belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran dan masukan yang membangun untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kebun Raya Mangrove Surabaya, sebagai berikut:

1. UPT KRM Kota Surabaya disarankan untuk memperkuat tata kelola ekowisata yang lebih inklusif dan terintegrasi melalui pembentukan FGD bersama masyarakat yang terlibat maupun penduduk lokal, dan menjalin koordinasi rutin serta forum evaluasi bersama dengan segenap pemangku kepentingan. Langkah kolaboratif ini perlu diimbangi dengan perluasan kemitraan dengan agen *tour & travel* dan penyediaan program binaan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat secara merata, serta merancang program pelatihan terkait pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi langsung dalam program kerja pengelola. Selain itu, diperlukan penyusunan SOP monitoring dan evaluasi yang mengacu pada standar nasional maupun internasional, dibarengi dengan ketegasan penegakan tata tertib larangan membawa makanan dari luar demi melindungi ekosistem ekonomi UMKM. Pengelola juga diharapkan mampu merancang pelaporan akuntabilitas lingkungan secara mandiri dan transparan terkait dampak aktivitas ekowisata secara komprehensif, sekaligus mengoptimalkan strategi promosi yang menonjolkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mengintegrasikan nilai seni dan budaya lokal ke dalam paket wisata reguler yang terstruktur.

2. Pemkot Surabaya disarankan untuk mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas lingkungan KRM Surabaya melalui alokasi anggaran khusus dan penguatan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, guna menjamin tata kelola ekologi yang terukur dan transparan. Selain itu, juga disarankan meninjau ulang penerapan kebijakan tarif masuk KRM Surabaya yang termuat pada Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih mempertimbangkan stabilitas dampak ekonomi masyarakat sekitar.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik atau lokus yang sama, diharapkan dapat menganalisis kontribusi kawasan terhadap indikator SDGs secara lebih spesifik.